



IPUNG PURWANDARI

DPRD Kota Jogja Bahas Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

## Perempuan Punya Hak Jalani Peran Publik dan Domestik

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Jogja bersama DPRD Kota Jogja tengah membahas Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejumlah fraksi telah memberikan pandangan terhadap raperda yang diajukan Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi. Di antaranya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja. Fraksi dengan jumlah kursi terbanyak di Dewan Kota itu menilai PUG dibangun sebagai strategi mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.

"Konstruksi sosial dalam masyarakat yang memberikan perlakuan, norma dan pandangan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan

pada kenyataannya berdampak terhadap diskriminasi gender," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari kemarin (23/3).

Diskriminasi gender, lanjut Ipung, menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut ketimpangan gender. Ketimpangan itu diperkuat dengan budaya tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki ketimbang perempuan.

"Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggung jawab pada peran publik dan perempuan hanya berkuat pada peran domestik," kata politisi asal Klaten, Surakarta ini

► Baca Perempuan... HJ 11



KESETARAAN GENDER. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari menyampaikan pandangan umum di depan rapat paripurna dewan.

# Perempuan Punya Hak Jalani Peran Publik dan Domestik

Sambungan dari hal 1

Diingatkan, perempuan punya hak dan menjalani peran domestik maupun publik. Karena itu, perlu pemahaman bersama tentang pengarusutamaan gender di Kota Jogja. Ipung lantas mengutip data indeks pemberdayaan gender (IPG) Kota Jogja meningkat secara signifikan pada 2021 dari semula 71,05 menjadi 73,18. Data itu berbanding terbalik dengan indeks pembangunan gender di kota gudeg ini hanya meningkat 0,03 dibandingkan tahun sebelumnya. "Perlu perhatian khusus terkait pemberdayaan dan pembangunan gender di Kota Jogja," pintanya.

Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Jogja Endarwanto menilai PUG selama ini masih lemah implementasinya, khususnya implementasi subjek-sub-

jek kelompok rentan seperti anak, difabel dan lansia. Raperda PUG itu sebagai tujuan nyata Pemkot Jogja melibatkan peran gender dalam segala hal. "Sehingga Kota Jogja menjadi kota yang responsif gender," ujar Daru sapaan akrabnya.

Dia juga minta agar Raperda PUG itu bisa memberikan manfaat yang setara dan adil bagi semua warga tanpa diskriminasi. Tidak hanya bagi pemerintah daerah. Tapi juga pada lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga daerah, dan organisasi masyarakat. "Materi dalam raperda ini perlu disinkronkan dengan Perda Provinsi DIY tentang Pengarusutamaan Gender," imbuh Sekretaris Fraksi PAN Ali Fahmi.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jogja Ririk Banowati Purnamasari meminta aparat pemerintah punya

kepekaan, kesadaran dan tanggap dalam mendukung terwujudnya keadilan serta kesetaraan gender. Guna memaksimalkan itu, Ririk mengusulkan perlu dipertimbangkan beberapa kegiatan yang mendukung PUG. Di antaranya seperti kegiatan advokasi, workshop, seminar dan *roundtable discussion*. "Atau mungkin kegiatan ngopi-ngopi pagi," usul dia.

Ririk ingin ke depan ada kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG. Khususnya peran kelompok kerja (Pokja) dan focal point seperti berbagai pelatihan dan advokasi tentang peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di Kota Jogja.

"Perda ini jangan hanya berhenti pada peraturan saja. Namun dalam operasionalnya harus direalisasikan secara optimal," ingatnya mewanti-wanti. (kus/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi
----	--------	-------	------------------

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005